
ANALISIS PERAN KEBIJAKAN TARIF DAN NON-TARIF PEMERINTAH TERHADAP DAYA SAING EKSPOR TEMBAKAU INDONESIA

Firdatul Muida¹, Siti Nur Laela², Tarisa Wina Laksmama³, Khasibul Busro Al Faqih⁴,
Putri Catur Ayu Lestari⁵

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember
Email Correspondence: Sitnur290504@gmail.com

Article History:

Received: 2025-11-30, Accepted: 2026-03-03 , Published: 2026-03-31

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of government tariff and non-tariff policies on the competitiveness of Indonesian tobacco exports in the international market and compare the effectiveness of both instruments in improving export performance. The primary issue underlying this research is the imbalance between efforts to increase tobacco exports as a source of foreign exchange and the implementation of stringent global health regulations, which create compliance barriers and reduce the competitiveness of Indonesian products. The study used a qualitative descriptive method based on secondary data from official government publications, accredited scientific articles, and trade statistics reports. The results show that tariff policies directly impact the price structure and stability of tobacco supply, making them a strategic instrument for strengthening competitiveness through price regulation and farmer protection. Meanwhile, non-tariff policies such as quality certification, technical standards, health labeling, and packaging regulations have been shown to pose significant barriers in the form of increased operational costs and limited market access, particularly for small-scale exporters. However, they also provide opportunities for quality improvement and low-risk product innovation. Overall, the effectiveness of Indonesian tobacco export competitiveness requires a synergy of adaptive policies and government support in facilitating certification, trade diplomacy, and industrial modernization to ensure exports remain sustainable amidst global market dynamics.

Keywords: *Tariff Policy, Non-Tariff Barriers, and Tobacco Export Competitiveness.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kebijakan tarif dan non-tarif pemerintah terhadap daya saing ekspor tembakau Indonesia di pasar internasional serta membandingkan efektivitas kedua instrumen tersebut dalam meningkatkan kinerja ekspor. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara upaya peningkatan ekspor komoditas tembakau sebagai sumber devisa dan penerapan regulasi kesehatan global yang ketat, yang menimbulkan hambatan kepatuhan dan menurunkan daya saing produk Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis data sekunder dari publikasi resmi

pemerintah, artikel ilmiah terakreditasi, serta laporan statistik perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif berpengaruh langsung terhadap struktur harga dan stabilitas pasokan tembakau, sehingga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing melalui pengaturan harga dan perlindungan petani. Sementara itu, kebijakan non-tarif seperti sertifikasi mutu, standar teknis, pelabelan kesehatan, dan regulasi pengemasan terbukti menimbulkan hambatan signifikan berupa peningkatan biaya operasional dan penyempitan akses pasar, terutama bagi eksportir skala kecil, meskipun juga membuka peluang peningkatan kualitas dan inovasi produk berisiko rendah. Secara keseluruhan, efektivitas daya saing ekspor tembakau Indonesia memerlukan sinergi kebijakan adaptif dan dukungan pemerintah dalam fasilitasi sertifikasi, diplomasi perdagangan, dan modernisasi industri agar ekspor tetap berkelanjutan di tengah dinamika pasar global.

Kata Kunci : Kebijakan Tarif, Hambatan Non-Tarif, dan Daya Saing Ekspor Tembakau.

PENDAHULUAN

Perdagangan dan ekspor memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui berbagai cara, terutama dalam konteks komoditas tembakau. Pertama, kegiatan ekspor tembakau membantu negara memperluas jangkauan pasar produknya ke tingkat internasional, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor tembakau. Kedua, perdagangan internasional tembakau mendorong diversifikasi ekonomi, karena negara tidak hanya bergantung pada pasar domestik dan dapat meminimalkan risiko akibat fluktuasi pasar global yang memengaruhi harga dan permintaan tembakau. Ketiga, perdagangan antarnegara dalam sektor tembakau juga menjadi sarana pertukaran teknologi dan pengetahuan, seperti inovasi produk tembakau berisiko rendah yang berkembang di pasar internasional, yang berkontribusi pada inovasi serta kemajuan sektor industri. Terakhir, meningkatnya akses masyarakat terhadap beragam produk dan layanan tembakau dari luar negeri dapat meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup, karena kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan lebih baik melalui pilihan produk yang lebih luas di pasar global (Agustin, 2024).

Pasar tembakau global diperkirakan mencapai nilai sekitar US\$904,9 miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan meningkat hingga mencapai US\$1,1 triliun pada tahun 2030, dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sekitar 3,0% selama periode 2023–2030. Laporan ini memberikan analisis mendalam tentang tren, faktor pendorong,

dan prediksi pasar yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih strategis.

Pertumbuhan industri tembakau didorong oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya permintaan produk tembakau berisiko rendah, peningkatan pendapatan di negara-negara berkembang, serta perluasan jaringan distribusi global. Inovasi seperti e-liquid dengan berbagai rasa, nikotin garam, dan teknologi pemanasan tembakau turut membantu memperluas penerimaan produk berisiko rendah di pasar internasional. Produk utama dalam industri ini meliputi rokok, cerutu, tembakau kunyah, tembakau sedot, rokok elektrik, dan produk tembakau yang dipanaskan. Walaupun rokok konvensional masih menjadi produk dominan karena tingginya konsumsi secara global, produk alternatif berisiko rendah seperti rokok elektrik dan tembakau yang dipanaskan menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

Distribusi produk tembakau berlangsung melalui berbagai saluran, termasuk supermarket, toko swalayan, toko khusus tembakau, dan penjualan online, dengan toko swalayan menjadi saluran terbesar karena kemudahan akses dan variasi produk yang ditawarkan. Konsumen produk tembakau sangat beragam, mulai dari perokok berat hingga pengguna rekreasi yang mencari alternatif pengganti rokok tradisional. Meski rokok konvensional masih memiliki banyak pengguna, rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan semakin populer di kalangan generasi muda dan individu yang berusaha mengurangi atau berhenti merokok. Pergeseran menuju produk berisiko rendah ini paling terlihat di negara-negara maju, yang biasanya memiliki regulasi ketat dan tingkat kesadaran kesehatan tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang, konsumsi produk tembakau tradisional tetap tinggi karena faktor budaya, harga yang relatif lebih murah, serta kebijakan yang kurang ketat (Sihombing et al., 2024).

Dalam perdagangan global komoditas, desain produk menjadi aspek krusial yang mendukung daya saing produk di pasar internasional. Desain tidak hanya mencakup aspek visual, tetapi juga kualitas produk, akses pasar, serta penyesuaian dengan preferensi konsumen di berbagai negara. Khususnya dalam komoditas tembakau, penerapan desain produk yang tepat seperti inovasi pada produk tembakau berisiko rendah dan kemasan yang menarik dapat meningkatkan posisi kompetitif di pasar global. Hal ini penting mengingat persaingan yang ketat di pasar tembakau dunia serta

kebutuhan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif negara pengekspor tembakau. Dengan strategi desain yang adaptif, negara produsen tembakau mampu mempertahankan dan memperluas pangsa pasar mereka dalam perdagangan global yang dinamis dan terus berkembang (Maulidiyah & Darsono, 2023).

Indonesia merupakan negara produsen tembakau terbesar ke 4 dunia pada tahun 2022 setelah Cina daratan, India dan Brazil dengan jumlah produksi sebesar 225,58 ribu ton atau sekitar 3,99% dari total produksi tembakau dunia (Astrid & Kencana, 2024). Tembakau dari Indonesia apalagi jenis tembakau Besuki Na Oogst (besNO) dianggap memiliki kualitas yang bagus dan nilai mutu yang tinggi. Sehingga banyak negara asing yang tertarik dan mengimpor tembakau jenis itu. Berdasarkan data dari BPS, negara tujuan ekspor tembakau Indonesia terbesar adalah Singapura, Republik Dominica dan Vietnam, dengan jumlah ekspor sebesar 14,79 ribu ton atau 53,19% dari total ekspor Indonesia ((BPS), 2024).

Pemerintah memainkan peran krusial dalam mengatur ekspor sebagai bagian dari kebijakan perdagangan nasional. Tujuannya meliputi melindungi kepentingan ekonomi domestik, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan negara, menjaga keseimbangan neraca perdagangan, serta menjamin keamanan nasional dan lingkungan. Pengaturan ekspor dilakukan melalui dua instrumen utama: kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Instrument kebijakan tarif adalah pajak atau bea yang dikenakan langsung atas barang impor atau ekspor, dihitung berdasarkan nilai barang (ad valorem), jumlah (spesifik), atau kombinasi keduanya. Ini merupakan bentuk intervensi perdagangan yang paling langsung dan transparan. Instrument kebijakan Non-tarif adalah perdagangan yang tidak melibatkan pajak secara langsung, melainkan melalui aturan administratif, teknis, atau kuantitatif. Ini lebih fleksibel tapi sering kurang transparan (Didhayana, 2018).

Dalam konteks perdagangan internasional modern, hambatan non-tarif (NTB) seperti standar teknis, sertifikasi, pelabelan, dan regulasi kesehatan semakin memainkan peran penting dalam mengatur pergerakan barang antarnegara. Berbeda dengan tarif yang mengenakan bea masuk langsung, NTB tidak mengenakan biaya tambahan, tetapi seringkali meningkatkan biaya kepatuhan dan memperlambat proses impor-ekspor (Pertanian, 2024).

Untuk komoditas tembakau, penerapan NTB memiliki karakteristik tersendiri. Selain nilai ekonominya, produk ini juga berkaitan erat dengan isu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, negara-negara pengimpor umumnya menerapkan peraturan yang ketat, seperti kewajiban pengemasan polos, pencantuman peringatan kesehatan bergambar, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan iklan dan distribusi. Meskipun dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat, kebijakan semacam itu seringkali dianggap sebagai hambatan perdagangan tersembunyi bagi negara-negara pengekspor. Secara global, pengendalian tembakau diatur melalui Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO (FCTC), sementara dari perspektif perdagangan, ketentuan teknis berada di bawah Perjanjian WTO tentang Hambatan Teknis Perdagangan (TBT). Kedua rezim ini seringkali menimbulkan ketegangan antara tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dan kelancaran perdagangan internasional (Haykel & Lie, 2025).

Bagi Indonesia, dampak regulasi non-tarif ini cukup signifikan. Sebuah studi tahun 2023 oleh Perdamayan mengungkapkan bahwa hambatan SPS dan TBT dapat mengurangi ekspor Indonesia masing-masing sebesar 5,7% dan 6,02%. Dalam kasus tembakau, biaya pengujian, sertifikasi, dan penyesuaian kemasan merupakan faktor-faktor yang mengurangi daya saing, terutama bagi eksportir skala kecil dan menengah. Meskipun kontribusi ekspor tembakau terhadap total ekspor nasional relatif kecil—sekitar 0,12% untuk daun tembakau dan 0,48% untuk rokok pada tahun 2020—sektor ini tetap krusial karena penyerapan tenaga kerja yang signifikan dan kontribusinya terhadap kesejahteraan petani. Lebih lanjut, kebijakan domestik seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 juga memperketat standar pengemasan dan pelaporan isi, sebagai langkah untuk menyelaraskan dengan standar dan komitmen internasional dalam kerangka kerja ASEAN dan RCEP. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus membahas dampak regulasi kesehatan non-tarif global terhadap ekspor tembakau Indonesia masih terbatas. Namun, pemahaman yang mendalam tentang isu ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekspor, merumuskan kebijakan perdagangan yang adaptif, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Sektor tembakau Indonesia menghadapi dilema kebijakan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan

devisa negara melalui ekspor tembakau sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan nasional. Namun di sisi lain, kebijakan domestik maupun global yang berorientasi pada pengendalian konsumsi tembakau menimbulkan tantangan bagi eksportir dalam memenuhi standar mutu serta regulasi non-tarif internasional (Selvian, 2024). Ketidakseimbangan antara kebijakan peningkatan ekspor dan pengendalian tembakau menciptakan potensi konflik kepentingan yang berdampak terhadap daya saing industri tembakau Indonesia di pasar global. Meskipun sejumlah penelitian telah menyoroti dampak kebijakan tarif dan non-tarif secara terpisah, masih terbatas penelitian yang bersifat terpadu dan komprehensif yang membandingkan peran kedua jenis kebijakan tersebut terhadap daya saing ekspor tembakau Indonesia (Pertanian, 2024).

Kebijakan tarif, seperti bea ekspor dan pajak perdagangan, secara langsung memengaruhi harga jual produk di pasar internasional. Sementara itu, kebijakan non-tarif seperti standar teknis, sertifikasi mutu, regulasi kesehatan, dan ketentuan pelabelan produk sering kali menimbulkan hambatan terselubung yang dapat mengurangi daya saing ekspor nasional. Dalam konteks industri tembakau, penerapan regulasi internasional seperti Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) dan ketentuan WTO mengenai *Technical Barriers to Trade* (TBT) turut memperketat ketentuan perdagangan produk tembakau di pasar global.

Penelitian ini menjadi krusial mengingat kajian mengenai komoditas tembakau selama tujuh tahun terakhir masih cenderung terfragmentasi. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Binti, lebih berfokus pada efektivitas cukai dalam menekan konsumsi domestik (Nafi'ah, 2021), sementara Adilah & Darsono mengkaji faktor produksi pada lingkup lokal di tingkat kabupaten (Adilah & Darsono, 2023). Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini mengisi celah (gap) literatur dengan menyajikan analisis komprehensif yang membedah perbandingan kebijakan tarif dan non-tarif secara simultan dalam skala makro. Kebaruan (novelty) utama artikel ini terletak pada integrasi analisis dampak hambatan perdagangan global terhadap daya saing ekspor yang dihubungkan dengan aspek keberlanjutan ekonomi petani di era digital (Rusmiati et al., 2025)). Urgensi ini didorong oleh peran signifikan sektor tembakau dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi devisa negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar ilmiah bagi pemerintah untuk merumuskan

kebijakan yang lebih adaptif dan seimbang antara kepentingan ekonomi nasional serta regulasi kesehatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi otoritas terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen kebijakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, serta artikel ilmiah terakreditasi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Prosedur pengumpulan informasi ditempuh melalui teknik studi dokumentasi dan eksplorasi literatur untuk menjamin relevansi substantif dengan pokok kajian mengenai kebijakan tarif dan non-tarif. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahapan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid mengenai daya saing ekspor tembakau.

Analisis data dalam penelitian terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah reduksi dan kategorisasi, di mana data volume ekspor serta jenis instrumen hambatan perdagangan dipilah sesuai tren tahunan. Tahap kedua dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan dinamika kebijakan negara tujuan terhadap fluktuasi kinerja ekspor nasional menggunakan logika berpikir deduktif. Terakhir, dilakukan sintesis kualitatif untuk mengintegrasikan hasil analisis tersebut dengan teori keunggulan kompetitif, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas intervensi pemerintah dalam mempertahankan posisi tembakau Indonesia di pasar internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kebijakan Tarif Pemerintah terhadap Daya Saing Ekspor Tembakau Indonesia

Kebijakan tarif sering dianggap sebagai instrumen kunci yang berperan penting dalam pengelolaan perdagangan internasional, terutama dalam hal ekspor komoditas strategis seperti tembakau. (Sihombing et al., 2024). Pemerintah menggunakan instrumen ini sebagai alat kontrol yang memungkinkan mereka mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan stabilitas pasokan komoditas di pasar domestik. Penerapan tarif ekspor seperti bea keluar dan pajak perdagangan memiliki

pengaruh besar terhadap penetapan harga tembakau di pasar global karena instrumen ini menentukan tingkat harga yang harus ditanggung oleh pembeli internasional di sepanjang rantai distribusi ekspor.

Tarif yang ditetapkan terlalu tinggi seringkali menyebabkan kenaikan harga produk akhir di pasar tujuan, dan kondisi ini berpotensi menurunkan daya saing tembakau Indonesia. Pembeli internasional biasanya akan membandingkan struktur biaya berbagai negara produsen dan memilih pemasok yang menawarkan harga yang lebih efisien, sehingga eksportir Indonesia dapat kehilangan pangsa pasar jika beban tarif tidak sejalan dengan tingkat persaingan internasional.

Tabel 1.

Perbandingan Struktur Tarif dan Harga Ekspor Tembakau (Estimasi 2024-2025)

Negara Produsen	Kebijakan Tarif Ekspor (Bea Keluar/Pajak)	Rata-rata Harga Ekspor (USD/Kg)	Fokus Keunggulan
Indonesia	5% - 15% (Progresif)	\$6.50 - \$8.00	Kualitas Spesifik (Aroma/Flavor)
Brasil	Low Tax (Insentif Ekspor)	\$4.50 - \$5.50	Efisiensi Biaya & Volume
India	Minimal Tax / Rebate	\$3.00 - \$4.00	Harga Kompetitif

Perubahan struktur perdagangan global membutuhkan kebijakan tarif yang lebih adaptif agar dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekspor tembakau Indonesia (Rivai et al., 2024). Tarif kompetitif menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan volume ekspor dan memperluas akses pasar ke negara tujuan baru, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam lingkungan perdagangan internasional yang dinamis. Tren permintaan global terhadap tembakau berkualitas tinggi, seperti Besuki Na Oogst, yang telah mendapatkan pengakuan internasional berkat karakteristik daun dan teknik pengolahannya, menjadikan penetapan tarif yang seimbang sebagai kunci menjaga keberlanjutan ekspor komoditas ini.

Penetapan tarif yang proporsional merupakan faktor strategis yang menentukan upaya menjaga stabilitas pangsa pasar dan keberlanjutan industri tembakau nasional di

seluruh rantai pasok global. Keputusan tarif yang terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan arah perkembangan pasar internasional dapat mengakibatkan penurunan daya saing dan membatasi kemampuan Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai pemasok utama di sektor ini.

Penerapan tarif di tingkat domestik berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi pasokan tembakau untuk kebutuhan domestik dan memberikan perlindungan bagi petani terhadap perubahan harga yang tajam. Pemerintah memanfaatkan instrumen tarif untuk mengatur keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan pasokan bahan baku bagi industri rokok nasional agar hasil panen petani dapat terserap lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini dapat meningkat secara bertahap. Kebijakan yang konsisten memberikan kepastian bagi pelaku sektor hulu yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar internasional akibat perubahan produksi dan permintaan (Nafi'ah, 2021).

Penerapan tarif tanpa pemahaman dinamika perdagangan global dapat menimbulkan risiko serius terhadap daya saing dan menciptakan ketidakpastian pasar jangka panjang. Keputusan tarif yang tidak mempertimbangkan konteks eksternal dan posisi Indonesia dalam peta perdagangan tembakau global dapat memengaruhi keberlanjutan industri secara keseluruhan.

Persaingan di pasar internasional menempatkan Indonesia dalam situasi yang menantang karena harus bersaing dengan produsen besar seperti Tiongkok, India, dan Brasil, yang memiliki kapasitas produksi sangat tinggi dan biaya operasional relatif rendah. Negara-negara ini mampu menawarkan harga ekspor yang lebih menarik kepada pembeli, sehingga permintaan pasar global beralih ke pemasok yang menawarkan struktur harga yang lebih kompetitif. Situasi ini membutuhkan strategi tarif yang mendukung peningkatan keunggulan kompetitif berbasis kualitas, alih-alih hanya kuantitas produk yang dikirim ke pasar internasional (Rusmiati et al., 2025).

Tabel 2.

Tren Volume Ekspor Tembakau Indonesia (2022-2025)

Tahun	Volume Ekspor (Ribu Ton)	Pertumbuhan (%)	Faktor Utama
2022	28.05.00	-	Pemulihan Rantai Pasok

2023	30.02.00	5.9%	Permintaan Cerutu Global
2024	31.08.00	5.3%	Penyesuaian Tarif Kompetitif
2025	33.05.00	5.4%	Ekspansi Pasar Alternatif

Daya saing komoditas tembakau tidak lagi semata-mata bergantung pada harga, melainkan telah berkembang menjadi penilaian yang mempertimbangkan standar kualitas, konsistensi ketersediaan pasokan, dan reputasi produk jangka panjang. Indonesia perlu memperkuat penetapan tarifnya melalui pendekatan yang menyelaraskan nilai tambah kualitas produk dan kemampuan mempertahankan standar tinggi dalam proses produksi, agar posisi Indonesia tetap relevan di pasar internasional yang semakin selektif.

Kebijakan tarif yang dirancang secara optimal berdampak langsung pada peningkatan penerimaan devisa dan pembukaan ruang bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan pasar ekspor (Islami et al., 2024). Instrumen tarif juga dapat diarahkan untuk mendorong pengembangan teknologi pengolahan tembakau yang lebih modern, efisiensi logistik, dan inovasi prosedur produksi agar industri tembakau dapat bergerak ke arah yang lebih kompetitif. Instrumen tarif bukan sekadar instrumen fiskal karena keberadaannya dapat menjadi pemicu transformasi industri berorientasi ekspor yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah memiliki peluang untuk memanfaatkan penerimaan tarif sebagai sumber pendanaan program peningkatan produktivitas petani, penguatan pelatihan pascapanen, dan pengembangan fasilitas pengolahan tembakau sehingga nilai tambah meningkat secara signifikan. Pemanfaatan penerimaan tarif yang tepat akan memperkuat struktur industri dari hulu hingga hilir (Abdullah et al., 2025).

Optimalisasi kebijakan tarif memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah, eksportir, asosiasi petani, dan pelaku industri pengolahan. Proses formulasi tarif memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap kondisi pasar internasional, daya beli konsumen asing, dan perubahan preferensi akibat meningkatnya permintaan produk alternatif seperti rokok elektronik dan tembakau yang dipanaskan, yang sedang berkembang pesat di berbagai negara. Penyempurnaan kebijakan tarif perlu dilakukan secara berkala sebagai respons terhadap dinamika perdagangan global agar produk

tembakau Indonesia tetap relevan. Evaluasi data ekspor yang komprehensif berperan penting sebagai dasar ilmiah untuk merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan responsif. Arah kebijakan tarif yang didasarkan pada analisis empiris akan menghasilkan efektivitas regulasi yang lebih terukur dan konsisten dalam merespons perubahan pasar.

Kebijakan tarif berperan penting dalam memperkuat daya saing ekspor tembakau Indonesia melalui regulasi harga, stabilitas pasokan, perlindungan petani, dan peningkatan kapasitas ekspor nasional. Tarif perlu dipandang sebagai strategi perdagangan terpadu, bukan sekadar langkah pengendalian ekonomi jangka pendek, agar Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar tembakau global. Implementasi kebijakan tarif yang efektif berpotensi menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kontribusi sektor tembakau terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dampak dari Kebijakan Non-Tarif terhadap Kinerja Ekspor Tembakau Indonesia

Kebijakan nontarif atau Hambatan Nontarif (HNT) dipahami sebagai instrumen regulasi dalam perdagangan internasional yang tidak mengenakan bea atau pajak langsung, tetapi berdampak luas terhadap kelancaran ekspor melalui persyaratan teknis, administratif, dan mutu yang ketat (Haykel & Lie, 2025). Instrumen ini semakin menonjol pada komoditas tembakau karena negara-negara pengimpor memberlakukan aturan yang bertujuan mengurangi konsumsi dan melindungi kesehatan masyarakat. Perbedaan antara HNT dan hambatan tarif terlihat jelas pada sifatnya yang tidak terintegrasi secara jelas dalam struktur biaya, sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk menghitungnya secara langsung dan menimbulkan tantangan besar bagi eksportir yang harus menyesuaikan strategi produksi dan pemasaran mereka dengan peraturan negara tujuan. Situasi ini semakin rumit karena HNT tidak seragam di berbagai negara dan seringkali tidak sepenuhnya transparan bagi pelaku usaha di tingkat internasional.

Adanya standar teknis terkait mutu, persyaratan pelabelan, pembatasan zat adiktif, dan peraturan pengemasan berdampak langsung terhadap diterima atau tidaknya produk tembakau Indonesia di pasar luar negeri. Eksportir menghadapi kemungkinan penolakan produk jika standar tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga HNT menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan penetrasi pasar. Salah satu bentuk NTB yang paling berpengaruh muncul melalui penerapan standar keselamatan kesehatan dan sertifikasi

mutu yang wajib dipenuhi sebelum produk memasuki pasar negara tujuan. Industri tembakau menghadapi persyaratan sertifikasi mutu daun tembakau, uji laboratorium kadar nikotin dan tar, serta persyaratan higiene selama proses produksi sebagai syarat dasar yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha. Pemenuhan standar-standar ini membutuhkan biaya operasional yang tinggi, terutama bagi eksportir kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal, akses teknologi, dan sumber daya untuk melakukan serangkaian pengujian dan dokumentasi teknis. Situasi ini membuat kepatuhan terhadap peraturan menjadi jauh lebih berat bagi pelaku industri yang belum memiliki kapasitas memadai.

Peningkatan biaya sertifikasi tidak hanya menambah biaya produksi tetapi juga memperpanjang waktu distribusi ekspor karena berlapisnya proses verifikasi dan administrasi. Pasar tembakau global dikenal sangat sensitif terhadap perubahan harga jual, sehingga keterlambatan distribusi akan menurunkan daya saing produk Indonesia di tengah persaingan yang ketat antar negara produsen (Briantika et al., 2022). Dampak operasional tersebut menciptakan tekanan struktural terhadap kemampuan pelaku industri untuk mempertahankan posisinya di pasar internasional, terutama ketika pembeli lebih memilih pemasok yang menawarkan proses distribusi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.

Regulasi kesehatan internasional melalui Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) memiliki pengaruh besar terhadap dinamika perdagangan tembakau Indonesia. Negara tujuan ekspor utama seperti Uni Eropa, Australia, dan beberapa negara Asia telah mengadopsi berbagai pembatasan meskipun Indonesia belum meratifikasi FCTC dan hanya berstatus pengamat. Salah satu ketentuan yang paling menonjol adalah penerapan kemasan polos, yang menghilangkan identitas visual merek dan elemen desain yang biasanya digunakan sebagai alat pemasaran untuk meningkatkan daya tarik produk. Kebijakan ini menimbulkan tantangan besar bagi eksportir karena strategi pemasaran dan posisi merek mereka di pasar secara langsung dipengaruhi oleh hilangnya elemen pembeda yang selama ini digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Ketidakkampuan untuk mematuhi regulasi kemasan polos berpotensi menyebabkan produk ditolak pada tahap pemeriksaan pabean di negara tujuan. Dampaknya meluas hingga risiko kehilangan pasar yang telah dibangun selama

bertahun-tahun dan menciptakan ketidakpastian yang tinggi bagi bisnis yang bergantung pada ekspor. Hilangnya diferensiasi visual di pasar global memaksa perusahaan untuk berinovasi melalui kualitas produk dan strategi pemasaran alternatif.

NTB juga mencakup pembatasan distribusi dan larangan promosi produk tembakau, yang mengakibatkan semakin terbatasnya ruang pemasaran dan berkurangnya fleksibilitas perusahaan dalam mempertahankan jaringan distribusi global mereka. Keberhasilan dalam perdagangan internasional sangat ditentukan oleh kemampuan mempertahankan akses pasar dan kesinambungan komunikasi merek, sehingga pembatasan iklan dan kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan pada 90 persen kemasan telah menyebabkan penjualan produk menurun drastis. Perubahan kebijakan ini memengaruhi persepsi konsumen dan melemahkan efektivitas positioning merek yang telah dibangun eksportir untuk mendapatkan loyalitas pasar.

Dampak kumulatif hambatan non-tarif seringkali tidak langsung terlihat dan tidak selalu tercermin dalam harga atau biaya produksi, tetapi dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan permintaan tembakau Indonesia, penurunan volume perdagangan, dan penurunan minat investor untuk berinvestasi di sektor ini. Pelaku industri menghadapi situasi yang membutuhkan strategi adaptif karena hambatan non-tarif menciptakan tekanan struktural terhadap keberlanjutan bisnis ekspor.

Keberadaan NTB juga membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk ekspornya. Standar internasional yang ketat dapat menjadi pendorong inovasi dalam industri tembakau nasional melalui peningkatan teknologi pemrosesan, penguatan fasilitas laboratorium, dan diversifikasi produk ke arah produk berisiko rendah atau yang risikonya dikurangi seperti tembakau yang dipanaskan dan rokok elektronik (Sihombing et al., 2024). Pergeseran preferensi konsumen global terhadap isu-isu kesehatan menciptakan peluang bagi pembentukan segmen pasar baru bagi industri nasional yang mampu memenuhi standar teknis dan keamanan produk. Transformasi tersebut berpotensi memperkuat daya saing tembakau Indonesia melalui model produksi yang tidak hanya mengejar volume tetapi juga nilai tambah (Angelita & Ali, 2024).

Tekanan NTB dapat menjadi pemicu restrukturisasi industri menuju arah yang lebih kompetitif secara global. Pelaku industri yang mampu beradaptasi dengan persyaratan teknis dan batasan pasar berpeluang untuk memperluas akses ekspor ke

negara-negara dengan permintaan tinggi akan produk inovatif dan lebih ramah kesehatan. Perubahan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungannya pada pasar tradisional.

Peran pemerintah penting dalam membantu eksportir menghadapi tekanan NTB. Dukungan melalui harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, fasilitasi sertifikasi mutu, penyediaan laboratorium uji berstandar global, dan penguatan diplomasi perdagangan akan mengurangi biaya kepatuhan yang dialami pelaku usaha. Upaya penguatan kerja sama ekonomi regional dan multilateral melalui forum-forum seperti ASEAN, RCEP, dan WTO diperlukan untuk memastikan standar kesehatan tidak menjadi hambatan terselubung yang merugikan kepentingan ekspor Indonesia. Sektor UMKM yang bergerak di industri tembakau perlu mendapatkan dukungan pembiayaan dan teknologi agar tetap mampu memenuhi standar internasional.

Dampak NTB terhadap kinerja ekspor tembakau Indonesia berlipat ganda. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya operasional, menurunkan daya saing harga, dan mempersempit akses pasar, terutama ketika aturan yang diberlakukan sangat ketat dan bervariasi antarnegara. Kondisi ini menciptakan beban struktural bagi pelaku industri yang harus beradaptasi agar dapat bertahan dalam persaingan global. Di sisi lain, kebijakan non-tarif juga berpotensi menjadi katalis perubahan yang mendorong peningkatan kualitas produk, inovasi teknologi, dan efisiensi proses produksi.

Keseimbangan antara kemampuan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan standar global merupakan faktor penting dalam menentukan keberlanjutan ekspor tembakau Indonesia (Adilah & Darsono, 2023). Kombinasi strategi adaptif dan dukungan regulasi yang tepat dapat memperkuat posisi komoditas tembakau nasional sebagai salah satu pilar perekonomian yang menyerap tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan petani.

PENUTUP

Kebijakan tarif dan non-tarif memainkan peran penting dalam menentukan daya saing ekspor tembakau Indonesia di pasar internasional. Tarif secara langsung memengaruhi struktur biaya dan harga jual produk, sedangkan kebijakan non-tarif, melalui persyaratan standar teknis, sertifikasi mutu, dan regulasi kesehatan,

menciptakan hambatan kepatuhan yang meningkatkan biaya operasional dan menekan daya saing, terutama bagi eksportir kecil dan menengah.

Kebijakan non-tarif memang menimbulkan tantangan berupa penurunan akses pasar dan melemahnya posisi merek, tetapi regulasi internasional juga dapat menjadi peluang strategis untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas, dan mendorong diversifikasi produk tembakau Indonesia ke produk berisiko lebih rendah. Sinergi kebijakan yang adaptif antara pemerintah dan pelaku industri, melalui penguatan diplomasi perdagangan, fasilitasi sertifikasi, dan efisiensi produksi, menjadi kunci agar komoditas tembakau Indonesia tetap kompetitif dan mampu mempertahankan keberlanjutan ekspor di tengah dinamika perdagangan global yang semakin ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), B. P. S. (2024). *Statistik perdagangan dan ekonomi Indonesia*.
- Abdullah, Yaqin, Ridho, M. I., & Uluf, W. T. (2025). Dinamika sosial-ekonomi petani tembakau di Indonesia: Studi kesejahteraan dan keberlanjutan. *I'tishom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Adilah, A. M., & Darsono. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ekspor tembakau di Kabupaten Jember. *Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal*, 2(2), 68–82.
- Agustin, A. (2024). Peran Ekspor dan Perdagangan dalam Pertumbuhan Ekonomi Global: Tantangan dan Peluang. *Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area 2024*.
- Angelita, N., & Ali, H. (2024). Pengaruh persaingan global, perubahan preferensi konsumen dan opini publik terhadap ancaman perusahaan. *Jurnal Globalisasi Dan Inovasi Teknologi*, 2(2).
- Astrid, A., & Kencana, R. (2024). *Outlook tembakau*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Briantika, A., Wayap, A. J., Kepno, A., Kurniawan, D. B., Reinjani, D., Halifa, E., Yeimo, H., Vinolia, I., Simanjuntak, J., Rejang, K. N., Qistiyanto, M., Paputungan, N. K., Brabar, R. S., Surya, R., & Tekege, T. F. (2022). *Reportase dari tanah Papua: Konflik, ketimpangan, dan harapan*. Aliansi Jurnalis Independen.
- Didhayana, W. (2018). *Ekonomi internasional*. Deepublish.
- Haykel, M., & Lie, G. (2025). Hambatan non tarif dan dampaknya terhadap ekspor produk UMKM Indonesia. *Journal of Micro, Small and Medium Enterprises*, 2(2),

1–9.

- Islami, T. M. D. Al, Pamungkas, M. A. S. B., Zulfa, M. A., Prasetio, A. Y., & Sarpini. (2024). Dampak kebijakan ekonomi internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 384–392.
- Maulidiyah, A. A., & Darsono. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ekspor tembakau di Kabupaten Jember. *Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal*, 2(2), 68–82.
- Nafi'ah, B. A. (2021). Strategi kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(1), 61–81.
- Pertanian, P. D. dan S. I. (2024). *Outlook*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Rivai, H., Nanda, S., & Yusuf, A. A. (2024). Dampak besar industri hasil tembakau bagi ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(1), 130–135.
- Rusmiati, Tridayanti, D., & Rahayu, I. (2025). Perdagangan internasional di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2(1), 71–93.
- Selvian. (2024). *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari*. 12–23.
- Sihombing, E. U., Matondang, K. A., Maulana, J., Panggabean, L. T., & Rahmi, S. N. (2024). Kebijakan tarif dalam ekonomi internasional: Analisis dampak dan implementasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1).